

TikTok activism: Analisis aktivisme digital #TolakRUUTNI di platform TikTok

TikTok activism: Analysis of digital activism #TolakRUUTNI on the TikTok platform

Jenna Jelajah Cakrawala¹, Subekti W. Priyadharma² & Detta Rahmawan³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

**Penulis Korespondensi*

Author's email:

¹jenna21001@unpad.ac.id

Keywords:

Digital activism,
netnography,
public sphere, TikTok,
#TolakRUUTNI

Kata kunci:

Aktivisme digital,
netnografi, ruang publik,
TikTok, #TolakRUUTNI.

Abstract: *The revision of the Indonesian National Armed Forces Bill (RUU TNI) has sparked a wave of public opposition, including through digital activism on the TikTok platform using the hashtag #TolakRUUTNI. This study used a qualitative approach with a netnography method through observation of 23 selected TikTok videos and user interactions in the comments section. The results show that digital activism through the hashtag #TolakRUUTNI is constructed into three main themes of criticism, namely criticism of the substance and legislative process, framing of the context of actors and history, and criticism of public apathy accompanied by calls for solidarity. Criticism is conveyed through various digital communication strategies, namely citizen journalism, sarcasm, fear appeal, emotional expression, playful activism, and calls to action. This study contributes to the study of digital communication in understanding how TikTok is used as a space for conveying messages about social and political issues.*

Abstrak: Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) memicu gelombang penolakan publik yang salah satunya melalui praktik aktivisme digital di platform TikTok dengan tagar #TolakRUUTNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi melalui observasi terhadap 23 video TikTok terpilih serta interaksi pengguna di kolom komentar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivisme digital melalui tagar #TolakRUUTNI dikonstruksi ke dalam tiga sasaran tema kritik utama, yakni kritik terhadap substansi dan proses legislasi, pembingkaihan konteks aktor dan sejarah, serta kritik terhadap apatisme publik yang disertai dengan seruan solidaritas. Kritik disampaikan melalui beragam strategi komunikasi digital, yaitu jurnalisme warga, sarkasme, *fear appeal*, ekspresi emosional, *playful activism*, dan *call to action*. Penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian komunikasi digital dalam memahami bagaimana TikTok dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian pesan mengenai isu sosial dan politik.

PENDAHULUAN

Gerakan #TolakRUUTNI muncul sebagai salah satu bentuk aktivisme digital yang menonjol di Indonesia pada Maret 2025, sebagai respons terhadap proses revisi Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang memicu kontroversi di ranah publik. Dinamika penolakan berlangsung secara daring di berbagai platform seperti X, Instagram, dan TikTok, serta meluas menjadi aksi luring berupa demonstrasi di sejumlah daerah.

Momentum eskalasi terjadi ketika RUU TNI disahkan menjadi Undang-Undang pada Kamis, 20 Maret 2025, yang bertepatan dengan demonstrasi di beberapa kota (misalnya Jakarta, Malang, dan Bandung). Pengesahan tersebut menjadi pemicu meluasnya diskusi dan protes, di mana tagar #TolakRUUTNI berfungsi sebagai sarana untuk menyuarakan penolakan, berbagi informasi, serta mengorganisasi aksi secara kolektif (Werdhani & Indryani, 2025).

Fenomena gerakan tagar #TolakRUUTNI bukanlah hal yang baru, melainkan beririsan dengan gerakan tagar lain yang juga ramai pada awal 2024 dan 2025 seperti #PeringatanDarurat dan #IndonesiaGelap. Kedua tagar tersebut memperlihatkan bagaimana media sosial digunakan untuk merespons isu-isu politik dan kebijakan negara, mulai dari dinamika putusan Mahkamah Konstitusi, isu korupsi, kebebasan berekspresi, evaluasi program pemerintah, hingga kebijakan pemangkasan anggaran. Namun, dibandingkan dengan dua tagar tersebut yang cenderung multi-isu, #TolakRUUTNI lebih fokus pada satu isu spesifik, yakni penolakan terhadap revisi UU TNI. Fokus tunggal ini menjadikan #TolakRUUTNI relevan sebagai unit observasi untuk memahami bagaimana aktivisme digital dibangun dalam konteks isu legislasi yang

dinilai krusial dan sensitif, khususnya terkait relasi antara masyarakat sipil dan militer.

Konteks politik kebijakan berawal ketika DPR pada awal 2025 memasukkan RUU TNI ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, sebuah keputusan yang menjadi titik awal perdebatan publik dan mobilisasi massa. Proses legislasi yang dipersepsikan terburu-buru dan tertutup sering kali menjadi katalis protes, sebagaimana terlihat pada berbagai gerakan sebelumnya, ketika tindakan legislasi yang minim partisipasi publik memicu resistensi kolektif (Wahyuningroem et al., 2023).

Kontroversi RUU TNI juga berakar pada sejumlah usulan perubahan pasal yang dipersepsikan berpotensi memperluas ruang militer di ranah sipil dan memunculkan kekhawatiran akan kemunduran demokrasi. Di titik inilah, media sosial berfungsi sebagai arena awal untuk membingkai isu, memproduksi wacana tandingan, serta membangun dukungan publik terhadap penolakan kebijakan.

Dalam kajian komunikasi digital, fenomena tersebut berkaitan erat dengan konsep aktivisme digital, yakni bentuk aktivisme yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya media sosial, untuk menggerakkan partisipasi individu maupun kelompok dalam mendukung isu atau gerakan tertentu (Aisyah et al., 2024; Carragee, 2019; Valera-Ordaz & López-García, 2019; Haslem, 2022). Aktivisme digital juga dipahami sebagai penggunaan strategis media dan platform daring untuk memulai, mengatur, dan memperkuat gerakan demi perubahan sosial-politik, dengan keunggulan pada kecepatan difusi informasi, pembentukan komunitas daring, serta mobilisasi lintas batas geografis (Vegh, 2013).

Peran media digital dalam mempercepat terbentuknya kesadaran kolektif serta menghubungkan individu yang terfragmentasi menjadi gerakan yang lebih terstruktur juga ditegaskan dalam kajian mengenai politik digital dan gerakan protes kontemporer (Howard & Hussain, 2013). Selain itu, Laer dan Aelst (2010) membedakan aktivisme digital menjadi dua kategori, yaitu aktivisme berbasis internet (aksi berlangsung sepenuhnya daring) dan aktivisme dengan dukungan internet (aksi luring yang difasilitasi oleh internet). Kerangka ini relevan untuk membaca #TolakRUUTNI karena gerakan ini memadukan diskursus dan mobilisasi daring dengan aksi demonstrasi di ruang fisik.

Di antara berbagai platform digital, TikTok muncul sebagai arena penting bagi diskursus sosial karena karakteristiknya yang audiovisual, partisipatif, dan berbasis algoritma, yang memungkinkan isu politik dikemas dalam format budaya populer. Signifikansi TikTok sebagai ruang produksi pesan didukung oleh pertumbuhan jumlah penggunanya yang sangat pesat di Indonesia. Berdasarkan laporan DataReportal 2026, TikTok tercatat memiliki sekitar 180 juta pengguna berusia 18 tahun ke atas di Indonesia pada akhir 2025. Angka ini merepresentasikan jangkauan iklan yang setara dengan 88,9% dari seluruh populasi dewasa atau mencakup 78,2% dari total pengguna internet lokal tanpa memandang usia. Situasi ini menjadikan TikTok relevan sebagai ruang produksi pesan dan sirkulasi wacana sosial-politik kontemporer.

Lebih lanjut, TikTok dipahami berpotensi efektif untuk aktivisme karena fitur video pendek, meme, sulih suara, duet, dan praktik kreativitas vernakular yang memungkinkan pengguna non-elit mengemas isu serius dalam format yang populer dan mudah dicerna (Lee & Abidin, 2023).

TikTok juga kuat dalam membangkitkan respons afektif melalui perspektif orang pertama, yang dapat menumbuhkan rasa keterlibatan dan perasaan menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar (Haslem, 2022). Praktik ini tampak pula pada aktivisme TikTok di Asia Tenggara, misalnya, kampanye #MakeSchoolASaferPlace di Malaysia maupun #JunkTerrorBill di Filipina, yang menunjukkan bagaimana TikTok dapat memfasilitasi arsip testimoni kolektif, mobilisasi, dan ekspresi kritik melalui parodi atau satir (Jalli, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menjadi fondasi penting dalam studi ini, tetapi masing-masing masih menyisakan celah penelitian yang spesifik. Jalli (2025) mengeksplorasi penggunaan TikTok sebagai instrumen aktivisme di tiga negara di Asia Tenggara. Meskipun memberikan gambaran makro, studi Jalli memiliki cakupan isu yang sangat luas, yaitu mulai dari Omnibus Law hingga RUU Antiterorisme, sehingga belum membedah secara mendalam bagaimana elemen visual dan interaksi spesifik di TikTok digunakan untuk mengartikulasikan penolakan terhadap satu kebijakan legislatif tertentu di Indonesia secara kronologis.

Selanjutnya, Lee dan Abidin (2023) memberikan kerangka teoritis mengenai potensi TikTok dalam menggerakkan aksi sosial secara global. Namun, fokus studi tersebut masih bersifat pengantar umum dan belum menyentuh dinamika politik Indonesia, terutama dalam menghadapi isu militerisme digital. Kultsum et al. (2025) menelaah isu RUU TNI tetapi terbatas pada platform X yang berbasis teks. Namun, tidak ada pembahasan mengenai RUU TNI di media lain.

Memperkaya perspektif *Critical Discourse Analysis* (CDA), Ningrum et al., (2024) menunjukkan elemen visual dalam komunikasi massa sering kali lebih dominan daripada bahasa verbal dalam membangun persepsi dan memanipulasi

kepercayaan audiens di Indonesia. Hal ini mengonfirmasi pentingnya membedah elemen nonverbal pada platform digital seperti TikTok. Temuan ini sejalan dengan temuan [Ramanathan dan Hoon \(2015\)](#) yang menegaskan bahwa wacana media sering kali digunakan untuk menyembunyikan ideologi tertentu sekaligus memperkuat citra positif kelompok otoritas terhadap kelompok yang tertindas.

[Lashari et al., \(2025\)](#) mengungkapkan bagaimana dokumen resmi dapat digunakan sebagai alat ideologis untuk mengonstruksi identitas dominan yang meminggirkan suara minoritas. Studi tersebut menegaskan bahwa media komunikasi bukanlah zona netral, melainkan diskursus yang secara aktif membentuk subjektivitas pengguna.

Dinamika persuasi di platform digital diperdalam oleh [Rad & Melendez-Torres \(2025\)](#). Mereka mengungkapkan bagaimana media sosial seperti Instagram dan Facebook menjadi ruang di mana otoritas medis dan daya tarik emosional dikonstruksi secara strategis untuk memicu tindakan langsung dari para pengguna. Pola ini memberikan gambaran tentang bagaimana fitur-fitur teknis platform tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk normalitas dan tanggung jawab sosial audiens dalam merespons isu tersebut.

[Matrood \(2025\)](#) memperjelas dimensi kritis dalam pemberitaan media. Melalui lensa *discourse-historical approach*, Matrood menunjukkan bagaimana strategi dalam teks media digunakan untuk menyembunyikan atau memperkuat agenda ideologis tertentu yang pada akhirnya membentuk persepsi publik terhadap krisis global. Pola ini menjadi landasan penting untuk melihat bagaimana kreator TikTok memandang identitas institusi seperti DPR atau TNI

dalam narasi penolakan terhadap kebijakan.

Mengenai kompleksitas interaksi di platform audiovisual, [Tai \(2023\)](#) memberikan landasan metodologis yang menekankan pentingnya melihat komunikasi bukan sekadar sebagai pertukaran kode bahasa, melainkan sebagai orkestrasi sumber daya multimodal dan spasial. Dengan menggabungkan analisis percakapan multimodal dan interpretasi fenomenologis, Tai menegaskan bahwa makna dalam ruang digital dibangun melalui momen-momen spontan yang melampaui batas-bahasa formal. Hal ini mendukung penelitian ini dalam membedah bagaimana elemen visual dan teknis TikTok, seperti transisi dan musik, menyampaikan kritik politik.

Perspektif mengenai penggunaan tanda dalam komunikasi politik digital diperkuat penelitian [Martiyana dan Ardianto \(2024\)](#). Studi keduanya menunjukkan bagaimana penggunaan gestur dan bahasa kode di TikTok berfungsi sebagai representasi simbolis yang membingkai karakter aktor politik di mata publik. [Novita et al., \(2026\)](#) menunjukkan analisis mengenai bagaimana mahasiswa Indonesia mengonstruksi identitas mereka sebagai komoditas digital melalui tanda-tanda denotatif dan konotatif. Studi ini menegaskan bahwa penggunaan TikTok oleh mahasiswa merupakan praktik kerja digital yang terorganisir untuk membangun mitos produktivitas dan kemandirian ekonomi, di mana identitas tersebut dibangun melalui simbol-simbol perjuangan autentik guna memobilisasi solidaritas digital.

Studi [Wijayanti dan Febriana \(2025\)](#) menunjukkan bagaimana penggunaan simbol-simbol budaya dan interaksi sosial yang bermakna di TikTok secara konsisten memperkuat identitas personal serta membentuk persepsi masyarakat terhadap figur publik sebagai

sosok yang merakyat. Pola konstruksi makna melalui media audiovisual ini juga sejalan dengan temuan penelitian Briandana (2019).

Beragam studi tersebut menunjukkan adanya kekosongan literatur dalam aspek analisis mikro-netnografi. Penelitian ini karenanya berusaha mengisi celah tersebut dengan melihat secara lebih spesifik, yaitu pembahasan isu, strategi komunikasi kreator, serta dinamika interaksi di kolom komentar yang membentuk budaya kolektif penolakan terhadap RUU TNI.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis aktivisme digital dalam tagar #TolakRUUTNI pada platform TikTok dengan menggunakan metode netnografi, yakni pengamatan dan analisis mendalam terhadap praktik budaya serta interaksi di ruang digital. Dengan menggunakan netnografi untuk mengkaji aktivisme digital dalam tagar #TolakRUUTNI, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kajian komunikasi digital, terutama dalam memahami TikTok sebagai ruang pembingkai isu, persuasi, dan mobilisasi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi aktivis atau organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi komunikasi yang sesuai dengan karakter platform, sekaligus memperkaya literasi publik tentang diskursus politik di media sosial.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoretis utama, yaitu teori ruang publik dan ruang publik tandingan, teori naratif, serta *Elaboration Likelihood Model (ELM)*.

Analisis dimulai dari level makro melalui teori ruang publik dengan memandang media sebagai arena diskursif tempat warga negara membentuk opini publik melalui pembahasan isu kepentingan bersama (Habermas, 1991).

Namun, karena ruang publik dominan sering kali dikuasai negara dan elit politik, penelitian ini juga mengacu pada konsep ruang publik tandingan dari Fraser (1990). Fraser menjelaskan bagaimana kelompok masyarakat sipil menciptakan ruang alternatif untuk memproduksi wacana tandingan. Dalam konteks ini, TikTok dipahami sebagai ruang publik tandingan yang memungkinkan warga dan kreator menantang narasi resmi negara terkait RUU TNI.

Dalam ruang publik tersebut, teori naratif dari Fisher (1987) digunakan untuk menjelaskan bagaimana kritik terhadap RUU TNI dibingkai dalam bentuk cerita kolektif. Teori ini menekankan koherensi dan fidelitas naratif sebagai dasar efektivitas persuasi. Dalam #TolakRUUTNI, narasi tentang ancaman terhadap demokrasi, trauma Orde Baru, dan solidaritas sipil beresonansi dengan memori kolektif audiens, sehingga memperkuat kohesi dan makna gerakan.

Penelitian ini juga menggunakan *Elaboration Likelihood Model (ELM)* untuk memahami mekanisme persuasi. *ELM* menjelaskan bahwa penerimaan pesan dapat berlangsung melalui rute sentral dan rute periferal (Littlejohn et al., 2011). Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana konten dengan teknik penyampaian komunikasi yang berbeda, contohnya *fear appeal*, sarkasme, dan estetika visual di TikTok, bekerja secara simultan dalam memengaruhi audiens dengan tingkat keterlibatan yang berbeda.

Penelitian ini karenanya mengintegrasikan tiga kerangka teoretis, yakni teori ruang publik dan ruang publik tandingan berfungsi sebagai landasan utama untuk memetakan platform TikTok sebagai arena alternatif dalam membahas isu-isu krusial terkait RUU TNI, sekaligus menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana kritik tersebut disampaikan dalam ruang yang tidak terakomodasi oleh narasi elit. Konteks penyampaian tersebut

kemudian diperdalam melalui teori naratif yang membedah mekanisme pembingkaihan isu oleh kreator agar selaras dengan memori kolektif audiens. Pada akhirnya, *ELM* digunakan untuk memahami bagaimana respons dan interaksi audiens terbentuk di kolom komentar sebagai hasil dari pemrosesan pesan tersebut, baik melalui keterlibatan substantif-kognitif pada rute sentral maupun respons emosional-estetika pada rute perifer.

Aktivisme digital dalam penelitian ini dipahami sebagai interaksi yang melibatkan aktor, yaitu kreator, target, yaitu kebijakan RUU TNI, serta teknologi digital sebagai instrumen komunikasi. Gerakan #TolakRUUTNI di platform TikTok dianalisis melalui tiga tipologi aktivisme digital yang dikembangkan oleh Joyce. Pertama, kesadaran atau advokasi, di mana platform digunakan untuk menyebarkan narasi penolakan terhadap RUU TNI. Kedua, organisasi atau mobilisasi, yaitu kreator yang memanfaatkan fitur-fitur TikTok untuk mengoordinasikan dukungan kolektif serta membangun solidaritas publik terhadap penolakan revisi undang-undang tersebut. Ketiga, reaksi yang muncul sebagai respons digital langsung dari masyarakat terhadap dinamika proses legislasi yang dianggap mengancam nilai demokrasi (Joyce, 2010).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode netnografi yang menggunakan pendekatan abduktif untuk memahami praktik aktivisme digital pada tagar #TolakRUUTNI di platform TikTok. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam praktik komunikasi, produksi makna, serta dinamika interaksi yang terjadi dalam komunitas daring (Kozinets, 2019).

Objek penelitian berupa konten video dan kolom komentar TikTok yang menggunakan tagar #TolakRUUTNI. Data dikumpulkan melalui teknik *web scraping*

menggunakan Zeeschuimer untuk mengekstraksi seluruh konten video dari platform TikTok dengan tagar #TolakRUUTNI selama periode Maret 2025. Dari proses *scraping* tersebut, diperoleh total 203 video yang kemudian menjadi sumber awal data penelitian.

Tahap berikutnya adalah penelusuran dan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh video hasil *scraping*. Peneliti menonton setiap video satu per satu dan melakukan pencatatan deskriptif yang mencakup seluruh aspek video. Selama proses ini, dilakukan reduksi data untuk memastikan kontennya relevan dengan fokus penelitian. Proses seleksi ini menghasilkan 138 video yang relevan.

Dari kumpulan 138 video tersebut, peneliti melakukan analisis awal terhadap kemunculan pola dan makna berulang dengan kriteria merujuk pada Kozinets (2019), yaitu relevansi isu, interaktivitas dan keragaman. Hasil analisis pola ini memunculkan 15 kategori tematik sementara yang kemudian direpresentasikan oleh 1 video per tema, sehingga diperoleh 15 video sebagai sampel awal untuk analisis.

Pendekatan abduktif tidak berhenti pada seleksi awal tersebut. Dalam proses analisis yang bersifat reflektif dan terbuka, peneliti kembali meninjau keseluruhan dataset 138 video dengan melihat relevansi isu, interaktivitas (yaitu jumlah *likes*, *comments*, dan *shares*), serta keragaman gaya komunikasi. Peneliti menambahkan beberapa video dari kreator yang sama yang menghasilkan lebih dari satu konten bertagar #TolakRUUTNI selama periode Maret 2025, sehingga dapat melihat bagaimana gaya komunikasi dilakukan oleh kreator yang paling dominan.

Proses tersebut menghasilkan 8 video tambahan, sehingga total video menjadi 23. Tahap berikutnya adalah proses pengkodean (*coding*) dan kategorisasi analitis terhadap 23 video terpilih. Pada tahap pengkodean ini,

peneliti kemudian melakukan proses tematisasi lanjutan, yaitu penyusunan ulang dan pengelompokan kode berdasarkan kesamaan makna, hubungan semantik, serta konteks sosial.

Data berupa teks, visual, audio, dan tangkapan layar komentar kemudian dianalisis secara tematik. Setiap video bisa masuk ke satu tema atau lebih dan pada akhirnya menghasilkan tema tertentu.

Peneliti melakukan refleksi melalui jurnal imersi yang berisi catatan interpretasi mendalam terhadap setiap video untuk menjaga netralitas interpretatif selama proses analisis. Selain itu, peneliti terlibat secara aktif dalam gerakan #TolakRUUTNI dengan berpartisipasi dalam interaksi digital dan budaya platform, sesuai dengan prinsip netnografi yang mengharuskan peneliti membenamkan diri dalam objek penelitian untuk memahami konteks secara utuh.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan validitas melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan analisis konten video dengan hasil wawancara mendalam bersama para kreator konten. Prosedur ini berfungsi sebagai proses verifikasi untuk memastikan bahwa kategori tematik yang dihasilkan selaras dengan perspektif dan tujuan komunikasi kreator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konten TikTok dengan tagar #TolakRUUTNI merupakan aktivisme digital yang terstruktur secara tematik, retorik, dan interaksional. Melalui pendekatan netnografi, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga aspek utama sesuai dengan pertanyaan penelitian, yaitu sasaran kritik, strategi penyampaian pesan, serta dinamika respons dan interaksi audiens di kolom komentar.

Sasaran Kritik

Dari sisi sasaran kritik untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, temuan menunjukkan bahwa kreator dalam tagar #TolakRUUTNI tidak hanya memusatkan perhatian pada substansi kebijakan semata, tetapi juga memperluas kritik terhadap aktor negara dan aktor masyarakat sipil. Pembagian tema dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 memetakan distribusi muatan pesan dari 23 video sampel, di mana satu video dapat masuk ke dalam lebih dari satu kategori, dan setiap video dianalisis satu per satu sehingga menghasilkan kategorisasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Distribusi Video TikTok Berdasarkan Tema Sasaran Kritik

Tema	Kategori	Total Video
Kritik Terhadap Subtansi dan Prosedural	Kritik Substansi pasal	2
	Kritik Proses Legislasi	2
	Kritik Dampak dan Konsekuensi	6
Pembingkai Konteks Aktor dan Sejarah	Pembingkai Sejarah	10
	Kritik Aktor dan Institusi	9
	Kritik Kekerasan Aparat	3
Kritik Apatisme Publik dan Seruan Solidaritas	Kritik Apatisme Publik	4
	Seruan Solidaritas	2

Sumber: Olahan data peneliti

Sasaran kritik pertama adalah tema mengenai substansi dan proses legislasi RUU TNI, yang membahas kritik terhadap pasal-pasal, yaitu Pasal 7 ayat 2 mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Pasal 47 mengenai penambahan jumlah kementerian dan/atau lembaga sipil yang dapat diduduki oleh personel TNI aktif. Selanjutnya, proses legislasi RUU yang minim partisipasi publik dan terburu-buru juga menjadi pembahasan yang disampaikan oleh kreator. Selain itu, terdapat juga kritik terhadap dampak RUU TNI yang membuat TNI dapat memasuki ranah masyarakat sipil, yaitu dengan menjabat di kementerian dan/atau lembaga sipil, serta membahas bagaimana RUU TNI memengaruhi ranah individu masyarakat, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dirasakan oleh beberapa pekerja Warga Negara Indonesia yang bekerja untuk perusahaan asing, karena Indonesia dianggap sebagai negara militer.

Kritik terhadap tema substansi pasal dan legislasi ini memperlihatkan kecenderungan kreator untuk membingkai RUU TNI sebagai ancaman terhadap prinsip supremasi sipil dan capaian reformasi, bukan hanya sebagai produk hukum administratif, tetapi juga sebagai proses legislatif serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh RUU tersebut. Temuan ini sejalan dengan pandangan Howard & Hussain (2013) yang menekankan bahwa aktivisme digital sering kali berangkat dari kegelisahan terhadap praktik kekuasaan yang dipersepsikan tidak akuntabel.

Contoh video yang membahas kritik terhadap pasal adalah video kode 11 pada gambar 1. Kreator membahas bagaimana pasal tersebut akan berdampak pada kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dalam pembuatan konten di media sosial.

“Karena di RUU TNI itu juga ditambahkan pasal tentang keamanan *siber*. Contohnya, misalnya lo content creator, content lo bisa aja di-take down kalau dianggap "mengancam" keamanan negara. Sesimpel konten Sela 'donatur dilarang ngatur', kalau misalnya dianggap ancaman untuk negara, itu bisa aja di-take down, akun lo bisa diblokir, dan juga bisa jadi di-banned. Tambahan pasal *cyber* ini terlalu karet dan terlalu abu-abu; bisa ditarik ke mana-mana.” (Konten video @i*****ory (24/3/2025))

Sasaran kritik kedua adalah tema pembingkaian historis dan kritik terhadap aktor. Sejarah yang dibahas oleh kreator adalah mengenai Orde Baru, konsep Dwifungsi ABRI, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada masa Orde Baru. Sejarah tersebut dianggap relevan dengan RUU TNI dan menjadi landasan untuk mengkritik RUU tersebut. Selain pembingkaian sejarah, kreator juga mengkritik aktor dan institusi negara seperti presiden, DPR, TNI, serta pemerintah secara umum.

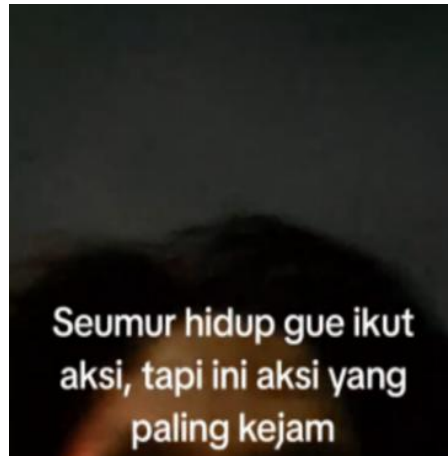
Kritik terhadap aktor negara dilakukan secara simbolik dan historis dengan merujuk pada rekam jejak kekuasaan, respons terhadap kritik publik, serta memori kolektif masa Orde Baru. Selain itu, pada tema ini, juga terdapat kritik yang diarahkan kepada aparat, yaitu TNI dan polisi, yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi demonstrasi. Kekerasan yang dibahas adalah kekerasan aparat dalam demonstrasi masa lalu, seperti pada Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1, serta kekerasan aparat dalam demonstrasi penolakan RUU TNI, seperti yang terjadi pada demonstrasi di DPRD Kota Malang pada 23 Maret 2025.

Salah satu konten yang membahas kekerasan aparat dapat dilihat pada tangkapan layar video kode 10 di bawah

ini. Isi video adalah rekaman langsung dari kreator saat demonstrasi.

Gambar 1

Tangkapan layar video kode 10 yang membahas kritik terhadap kekerasan aparat



Sumber: Hasil tangkapan layar langsung

Dalam konteks tema pembinggkiaan historis dan identifikasi aktor ini, kebijakan tidak dipisahkan dari subjek yang menjalankannya, sehingga kritik juga disampaikan kepada pihak pemerintah dengan sejarah sebagai landasan.

Sasaran kritik ketiga adalah kritik terhadap publik itu sendiri. Kritik terhadap apatisme publik memiliki dua pembahasan, yaitu kritik terhadap bentuk massa aksi bayaran yang mendukung RUU TNI dan kritik terhadap sikap diam masyarakat dalam menanggapi RUU TNI. Namun, kritik ini berjalan beriringan dengan seruan solidaritas yang menegaskan bahwa keterlibatan publik merupakan tanggung jawab kolektif. Seruan solidaritas disampaikan melalui dua pembahasan, yaitu seruan solidaritas melalui representasi demonstrasi secara langsung, yaitu konten-konten yang menampilkan dokumentasi aksi #TolakRUUTNI. Selain itu, terdapat ajakan untuk bersuara di media sosial apabila tidak dapat mengikuti aksi demonstrasi secara langsung, yang dapat dilihat pada konten video kode 14 berikut.

“Gak harus turun ke jalan, tapi ayo satu suara. Kawan-kawan mahasiswa hari ini berjuang melawan represivitas militer di jalan. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Kita bantu, bersuara di media sosial.” (Konten video @*****asyh, 21/3/2025)

Temuan kritik atas apatisme publik dan seruan solidaritas ini menunjukkan bahwa aktivisme digital dalam #TolakRUUTNI juga mengkritik sikap masyarakat sipil yang masih apatis terhadap RUU TNI.

Secara teoretis, temuan ini menguatkan konsep ruang publik tandingan [Fraser \(1990\)](#). Dalam hal ini, TikTok berfungsi sebagai arena alternatif bagi warga untuk membangun wacana kritis yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam ruang publik yang dominan.

Strategi Komunikasi

Dari sisi strategi komunikasi untuk menjawab tujuan penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa kreator menggunakan beragam bentuk penyampaian kritik yang adaptif terhadap

karakteristik TikTok sebagai platform audiovisual. Terdapat 6 strategi yang

ditemukan dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Distribusi Video TikTok Berdasarkan Gaya Komunikasi

No	Gaya Komunikasi	Total Video
1	Jurnalisme Warga	4
2	Sarkasme	11
3	Ekspresi Emosional	5
4	<i>Fear Appeal</i>	8
5	<i>Playful Activism</i>	3
6	<i>Call To Action</i>	8

Sumber: Olahan data peneliti

Gaya komunikasi yang paling sering digunakan dalam penelitian ini adalah sarkasme, *fear appeal*, dan *call to action*.

Sarkasme

Penggunaan sarkasme menjadi gaya komunikasi yang paling dominan, dengan 3 bentuk sarkasme yang ditemukan, yaitu penekanan sarkasme pada kalimat, kata, dan tindakan. Sesuai dengan yang dibahas oleh [Camp \(2012\)](#) mengenai penekanan sarkasme. Penggunaan sarkasme dalam menyampaikan kritik menjadi daya tarik tersendiri, di mana pembahasan isu politik disampaikan secara kontradiktif, yaitu dengan format yang menghibur dan sederhana.

Fear Appeal

Penggunaan *fear appeal* juga banyak ditemukan dengan membahas ancaman terhadap kebebasan sipil, keselamatan individu, serta masa depan ekonomi dan karier generasi muda yang dibingkai secara naratif dan visual sehingga konkret dan relevan secara personal. Tingkatan *fear appeal* yang dominan adalah *fear appeal* tingkat sedang. Mengacu pada [Hovland et al., \(1953\)](#), pesan *fear appeal* tingkat sedang mengandung pesan yang berfokus pada ancaman yang serius dan faktual, tetapi

tidak menggunakan visualisasi kekerasan grafis atau menijikkan. *Fear appeal* tingkat sedang menyajikan bahaya dalam konteks yang lebih umum, tetapi tetap relevan secara personal. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa *fear appeal* cenderung efektif ketika ancaman dipersepsikan dekat dengan kehidupan audiens ([Mieczkowski & Dillard, 2017](#)).

Jurnalisme Warga

Selain strategi persuasif berbasis ketakutan dan sarkasme, kreator juga memanfaatkan gaya jurnalisme warga, ekspresi emosional, dan *playful activism*.

Praktik jurnalisme warga terlihat melalui dokumentasi aksi demonstrasi dan kurasi arsip sejarah yang dilakukan oleh kreator. Konten semacam ini berfungsi sebagai sumber informasi alternatif yang menantang dominasi media arus utama dan memperkuat peran warga sebagai produsen informasi. Sehingga jurnalisme warga digunakan oleh kelompok-kelompok yang kurang terwakili untuk menyuarakan isu-isu keadilan sosial dan memberikan perspektif tandingan yang sering diabaikan oleh media konvensional, sebagaimana dikemukakan dalam ([Wall, 2018](#)).

Ekspresi Emosional

Penggunaan ekspresi emosional, seperti kesedihan dan kemarahan. Menurut kerangka Petty et al., (2002), ketika audiens dihadapkan pada narasi yang memicu kesedihan atau kerugian personal yang mendalam, audiens cenderung memproses pesan tersebut dengan melibatkan perasaan subjektif dan relevansi audiens terhadap objek yang dibahas. Salah satu contohnya adalah video yang membahas meningkatnya risiko pekerjaan bagi masyarakat sipil setelah RUU TNI disahkan. Selain itu, dalam kerangka yang sama, ekspresi kemarahan dapat berfungsi sebagai bukti validitas. Tingginya intensitas kemarahan yang ditampilkan kreator menjadi sinyal bagi audiens bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang serius. Strategi ini tampak jelas dalam beberapa video. Contohnya, salah satu video mengangkat fakta tentang ancaman terhadap pers yang dirasakan oleh jurnalis perempuan.

Playful Activism

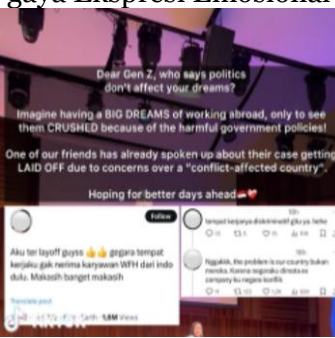
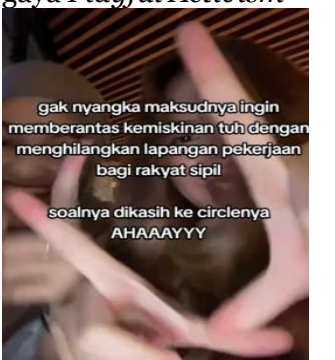
Penggunaan *playful activism* dilakukan melalui tren TikTok, tarian, serta penyuntingan audiovisual seperti *velocity*, *jedag-jedug*, dan penyuntingan sinematik. Strategi ini menunjukkan bagaimana pesan politik yang serius dapat dikemas dalam format budaya populer tanpa kehilangan muatan kritisnya. Hal ini mendukung temuan Lee dan Abidin (2023) yang menegaskan bahwa kreativitas vernakular di TikTok memungkinkan advokasi sosial menjangkau audiens muda secara lebih luas dan lebih natural.

Call To Action

Penggunaan *call to action* ditemukan dalam berbagai video. Dorongan ini dibagi menjadi 3, yaitu dorongan untuk mencari informasi, berpartisipasi, dan melakukan aksi politik secara langsung. Penggunaan *call to action* ini biasanya disampaikan di akhir video untuk mengajak audiens agar lebih memahami isu RUU TNI. Setiap gaya komunikasi dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2

Tangkapan layar video dari setiap gaya komunikasi

Contoh video dengan gaya Sarkasme 	Contoh video dengan gaya Fear Appeal 	Contoh video dengan gaya Jurnalisme Warga 
Contoh video dengan gaya Ekspresi Emosional 	Contoh video dengan gaya Playful Activism 	Contoh video dengan gaya Call To Action 

Sumber: Tangkapan langsung pada akun TikTok

Analisis penelitian juga menemukan pola repetisi aktor dominan, di mana 3 kreator secara berulang membuat video kritik terhadap RUU TNI. Salah satu kreator memiliki isi pesan utama yang membingkai ancaman RUU TNI secara spesifik sebagai teror terhadap kebebasan berekspresi, misalnya dengan menyatakan bahwa membaca buku-buku yang dianggap tidak sesuai akan diancam

oleh aparat. Ini merujuk pada masa Orde Baru.

Kreator menyampaikan isu dengan gaya sarkastis dan ironis. Pola repetisinya terletak pada pengambilan gambar kasual yang dipadukan dengan teknik editing velocity, dengan durasi video singkat dan menitikberatkan konteks pada teks yang ringkas. Analisis terhadap pola akun dominan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Analisis Video Akun Kreator Dominan 3

Tanggal	Transkrip Video	Gaya Penyampaian	Jumlah Views	Jumlah Likes	Jumlah Komentar
20 Maret 2025	"Being Indonesian is scary, bayangin lagi enjoy baca buku di bawah pohon tbtb disamperin anggota berseragam dan dibuang ke laut (elunya)"	Sarkasme <i>Fear Appeal</i> <i>Playful Activism</i>	2,600,000	448,100	3,415
17 Maret 2025	"Welcome orba 2.0. Infokan toko ayat2 kiri yg jaminannya ga diculik dong guys."	Sarkasme <i>Playful Activism</i>	613,900	91,300	1,408

Sumber: Hasil olahan peneliti**Respons dan Interaksi**

Dari sisi respons dan interaksi pengguna di kolom komentar, hasil penelitian menunjukkan bahwa audiens tidak berperan pasif, melainkan aktif dalam membangun makna dan memperluas diskursus. Respons pengguna terhadap video kreator mencakup dukungan, kekhawatiran, kritik, hingga respons simbolik berupa humor dan sarkasme. Dalam hal ini, kerangka *Elaboration Likelihood Model* (ELM) digunakan untuk memetakan bagaimana audiens memproses pesan melalui respons dan interaksi tersebut, yang diklasifikasikan ke dalam dua jalur utama, yaitu rute sentral dan rute perifer.

Temuan menunjukkan bahwa persuasi dalam #TolakRUUTNI berlangsung melalui kombinasi kedua rute tersebut secara simultan. Respons yang bersifat diskursif, berupa pertukaran argumen substansial dan pencarian informasi mendalam mengenai pasal-pasal RUU TNI, merepresentasikan pemrosesan melalui rute sentral. Pada jalur ini, audiens melakukan elaborasi kognitif yang tinggi karena menganggap isu tersebut relevan dan penting. Sebaliknya, respons berbasis emosi, dukungan singkat, serta penggunaan humor dan sarkasme menunjukkan pemrosesan melalui rute perifer, di mana isyarat visual, daya tarik emosional (*fear appeal*), dan estetika video berfungsi sebagai pemicu keterlibatan tanpa memerlukan evaluasi argumen yang kompleks (lihat gambar 3 dan 4).

Gambar 3

Komentar dengan interaksi diskursif



Sumber: Hasil tangkapan layar

Gambar 4

Komentar dengan interaksi humor



Sumber: Hasil tangkapan layar

Dalam kerangka ELM, [Littlejohn et al., \(2011\)](#), temuan ini menunjukkan bahwa persuasi dalam #TolakRUUTNI berlangsung melalui kombinasi rute periferal dan rute sentral. Isyarat emosional dan visual berfungsi sebagai pemicu awal keterlibatan, sementara diskusi dan debat di kolom komentar

memfasilitasi elaborasi pesan yang lebih mendalam.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konten dan interaksi dalam tagar #TolakRUUTNI dibangun melalui struktur naratif yang relatif koheren. Kreator tidak menyajikan RUU TNI sebagai isu teknis legislasi, melainkan sebagai cerita kolektif tentang

ancaman terhadap demokrasi, trauma sejarah, dan pentingnya solidaritas sipil. Narasi ini memiliki fidelitas tinggi karena beresonansi dengan memori kolektif masyarakat Indonesia tentang Orde Baru dan Reformasi 1998. Mengacu pada teori naratif (Fisher, 1987), proses berkembangnya gerakan ini bekerja melalui logika Teori Naratif, di mana karakteristik teknis TikTok, seperti penggunaan audio yang sedang tren, transisi visual yang cepat, dan durasi singkat, berfungsi meningkatkan koherensi narasi sehingga pesan yang kompleks menjadi lebih mudah dicerna. Pengemasan isu RUU TNI ke dalam format yang populer di TikTok menciptakan fidelitas naratif yang tinggi. Artinya, cerita yang disampaikan terasa sangat nyata dan relevan bagi audiens karena menggunakan bahasa visual dan budaya digital yang mereka kenali sehari-hari. Dengan demikian, TikTok bukan sekadar saluran distribusi, melainkan aktor yang membentuk narasi perlawanan agar mampu beresonansi secara emosional dan ideologis dengan memori kolektif publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konten TikTok bertagor #TolakRUUTNI merupakan praktik aktivisme digital yang terorganisasi secara wacana dan memiliki makna politik yang kuat. Sasaran kritik yang dibangun kreator terstruktur secara tematik dengan menyasar substansi dan proses legislasi RUU TNI, aktor dan institusi negara, serta sikap publik yang apatis.

Dalam menyampaikan kritik, konten video dengan tagor #TolakRUUTNI menggunakan beberapa strategi komunikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kritik disampaikan melalui jurnalisme warga, sarkasme, ekspresi emosional, *fear appeal*, *playful activism*, dan *call to action* yang disesuaikan dengan

karakteristik TikTok sebagai platform audiovisual.

Strategi tersebut membangun keterlibatan emosional dan kognitif pada audiens. Hal ini tercermin dalam respons dan interaksi pengguna di kolom komentar yang didominasi oleh dukungan, kekhawatiran, diskusi, dan solidaritas, serta menunjukkan bahwa audiens berperan aktif dalam memperluas dan memaknai pesan penolakan tersebut. Dengan demikian, TikTok berfungsi sebagai ruang publik digital tempat kritik politik diproduksi, diperdebatkan, dan diperkuat secara kolektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa aktivisme digital melalui tagor #TolakRUUTNI memperlihatkan bagaimana media sosial tidak hanya menjadi medium penyebaran pesan, tetapi juga ruang pembentukan opini publik dan ruang diskusi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme di TikTok dalam gerakan #TolakRUUTNI berlangsung dengan beragam sasaran kritik dan strategi komunikasi. Respons audiens yang muncul bersifat beragam dan kontekstual, mencerminkan karakter ruang digital sebagai arena kritik politik dalam dinamika demokrasi digital di Indonesia.

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat proposisi *Elaboration Likelihood Model (ELM)* dalam konteks kualitatif, di mana penggunaan sarkasme dan *fear appeal* tingkat sedang terbukti berfungsi sebagai isyarat perifer yang menginisiasi keterlibatan audiens sebelum berkembang menjadi pemrosesan pesan yang lebih mendalam di kolom komentar.

Temuan ini juga memperluas teori naratif dengan menunjukkan bahwa fidelitas naratif dalam aktivisme digital dibangun melalui pengemasan isu kebijakan yang kaku menjadi "cerita kolektif" yang beresonansi dengan memori trauma sejarah audiens. Secara

keseluruhan, studi ini merevisi pemahaman tradisional mengenai ruang publik dengan mengonfirmasi bahwa TikTok berfungsi sebagai ruang publik tandingan yang unik, di mana artikulasi politik warga terjadi melalui perpaduan antara diskursus kritis dan ekspresi kreatif yang saling melengkapi dalam membangun kesadaran kolektif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada dinamika aktivisme digital di platform TikTok. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis ke platform media sosial lain guna membandingkan karakteristik diskursus yang muncul. Selain itu, mengingat studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami kedalaman makna dan narasi, penelitian mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan metode kuantitatif untuk memetakan pola sebaran wacana dan tingkat keterlibatan audiens secara lebih

luas. Agenda penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai ekosistem aktivisme digital di Indonesia dari berbagai sudut pandang metodologis.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya transparansi yang lebih besar pada setiap tahapan proses legislasi nasional. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa kritik publik dalam tagar #TolakRUUTNI berfokus pada mekanisme penyusunan regulasi yang dinilai terburu-buru dan tertutup bagi akses masyarakat luas, seperti pelaksanaan rapat di lokasi yang eksklusif. Oleh karena itu, pemerintah dan pembuat kebijakan harus memastikan bahwa setiap proses penyusunan undang-undang dilakukan secara inklusif dengan membuka ruang dialog substantif bersama kelompok masyarakat sipil dan para akademisi.

REFERENSI

- Aisyah, N., Rustono, D., Marta, F., & Briandana, R. (2024). Media Sosial dan Aktivisme Digital Perempuan: Analisis Wacana #Ibutunggalmelawan di Instagram. *Jurnal Komunikasi*, 18(April), 109–132. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss2.art1>
- Briandana, R. (2019). Representation of political ideology in advertising: Semiotic analysis in Indonesian television. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 4(3), 764–775. <https://doi.org/10.22161/ijels.4.3.31>
- Camp, E. (2012). Sarcasm, pretense, and the semantics/pragmatics distinction. *Noûs*. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0068.2010.00822.x>
- Carragee, K. M. (2019). Communication, activism and the news media: An Agenda for future research. *Communication and Society*, 32(4 Special Issue), 361–378. <https://doi.org/10.15581/003.32.4.361-378>
- Fisher, W. R. (1987). *Human communication as narration: Toward a philosophy of reason. Value, and Action*. University of South Carolina Press.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. Milwaukee, WI: Univ. of Wisconsin-Milwaukee. *Center for Twentieth Century Studies*.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Polity Press.
- Haslem, B. (2022). TikTok as a digital activism space: Social justice under algorithmic control. *Old Dominion University* (Thesis). <https://doi.org/10.25777/d5v6-ab64>
- Hovland, C. I., Kelley, H. H., & Janis, I. L. (1953). *Communication and persuasion: Psychological study of opinion change*. Yale University Press.
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's fourth wave?* Oxford University Press. <https://backend.production.deepblue-documents.lib.umich.edu/server/api/core/bitstreams/22841b1f-9307-480e-9e94-e99fc7d8c51f/content>
- Jalli, N. (2025). Viral justice: TikTok activism, misinformation, and the fight for social change in Southeast Asia. *Social Media and Society*, 11(1). <https://doi.org/10.1177/20563051251318122>
- Joyce, M. C. (2010). *Digital activism decoded: The new mechanics of change*. IDEA. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=w3AOzoq7VfIC&oi=fnd&pg=PR7&dq=joyce+digital+activism&ots=WolD1JYr6n&sig=OPByeF1-8umfvE5CTt8aDtkq2oM>
- Kozinets, R. V. (2019). Netnography: The essential guide to qualitative netnography research. In *Netnography* (Number May). SAGE. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781800377486.netnography>
- Kultsum, U., Fajri, F. N., Putri, N. A., Prayoga, M. B., Mubarak, A. A., & Nisa, P. K. (2025). Dinamika opini publik terhadap UU TNI di Indonesia: Studi kasus kampanye online di media X. *Jurnal Studi Multidisipliner Berkelanjutan*, 9. https://ojs.ubesco.com/index.php/j_smb/article/view/796

- Lashari, A., Shah, W. A., & Memon, T. (2025). 'Are we equal citizens?': A critical discourse analysis (CDA) of language textbooks and minority faith learners' insights in Pakistan. *Asia Pacific Journal of Education*, 45(4), 1212–1229. <https://doi.org/10.1080/02188791.2023.2270176>
- Laer, J. Van, & Aelst, P. Van. (2010). Internet and social movement action repertoires. *Information, Communication & Society*, 1–26. <https://doi.org/10.1080/13691181003628307>
- Lee, J., & Abidin, C. (2023). Introduction to the special issue of "TikTok and social movements. *Social media+ Society*. <https://doi.org/10.1177/20563051231157452>
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2011). *Theories of human communication*. Long Grove, IL. Waveland Press, Inc.
- Martiyana, D., & Ardianto, E. (2024). Semiotic analysis of presidential candidate roasting video content on TikTok's @sandissukron. *Digital Theory, Culture & Society*, 2(1), 13–26. <https://doi.org/10.61126/dtcs.v2i1.29>
- Matrood, D. T. (2025). The representation of Gaza's humanitarian crisis in the BBC news report: A critical discourse analysis. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 6(1), 924–928. <https://doi.org/10.54660/ijmrge.2025.6.1.924-928>
- Meczkowski, E. J., & Dillard, J. P. (2017). Fear appeals in strategic communication. In P. Rossler, C. A. Hoffner, & L. van Zoonen (Eds.), *The international encyclopedia of media effects*. Wiley. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0160>
- Ningrum, D. W., Siahaan, U. K., Sidauruk, Y. E., Herman, S., B., S., Y. K., & Rahmawati. (2024). An analysis on critical discourse analysis (CDA) of Norman Fairclough's theory on advertisement. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 43–49. <https://doi.org/10.51699/mjssh.v4i1>
- Novita, E., Julianti, I., Pujiana, I., & Dianthi, M. H. (2026). Self-commodification of university students in TikTok content: A visual and verbal semiotic analysis. *MJ Multidisciplinary Journals*, 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/mj.v3i1.1182>
- Petty, R. E., Fabrigar, L. R., & Wegener, D. T. (2002). Emotional factors in attitudes and persuasion. In R. J. Davidson, K. R. Scherer, & H. H. Goldsmith (Eds.), *Handbook of affective sciences* (pp. 752–772). Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780195126013.001.0001>
- Rad, J., & Melendez-Torres, G. J. (2025). Critical discourse analysis of social media advertisements for GLP-1 receptor agonist weight loss drugs: implications for public perceptions and health communication. *BMC Public Health*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-24197-8>
- Ramanathan, R., & Hoon, T. B. (2015). Application of critical discourse analysis in media discourse studies. *The Southeast Asian Journal of English Language Studies*, 21(2), 57–68. https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A9%3A5616185/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A110005147&crl=c&link_origin=www.google.com
- Tai, K. W. H. (2023). *Multimodal conversation analysis and interpretative phenomenological analysis: A methodological*

- framework for researching translanguage in multilingual classrooms. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003351047>
- Valera-Ordaz, L., & López-García, G. (2019). Activism, communication and social change in the digital age. *Communication and Society*, 32(4 Special Issue), 171–172. <https://doi.org/10.15581/003.32.4.171-172>
- Vegh, S. (2013). Classifying forms of online activism: The case of cyberprotests against the World Bank. *Cyberactivism*. <https://doi.org/10.4324/9780203954317-5>
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2023). Youth political participation and digital movement in Indonesia: the case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw. *F1000Research*, 12, 543. <https://doi.org/10.12688/f1000research.122669.1>
- Wall, M. (2018). *Citizen journalism: Practices, propaganda, pedagogy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351055703>
- Werdhani, L., & Indryani, G. W. (2025). Citizen participation in national policy formulation: Analysis TNI law rejection through social media. *Public Policy and Management Inquiry*, 9. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2025.9.1.15704>
- Wijayanti, N. F., & Febriana, P. (2025). Analysis of Bobon Santoso's semiotics as a chef Indonesian people on TikTok. *International Conference on Social Science and Humanity*, 2(2), 2214–2235. <https://doi.org/10.61796/icossh.v2i2.451>